

## **EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA BULUKERTO DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

**Hardi Hasim, Abd. Rohman**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Email: [rabitza@gmail.com](mailto:rabitza@gmail.com)

***Abstract:** The effectiveness of the village administration Bulukerto very important influential in the development process in the village, as through the village administration a development physical or non-physical would be a fulfillment of when the government the village was really do their tasks correctly. Government programs village Bulukerto in increase the participation of the society the village administration held socialization and deliberation with village officials Bulukerto to deliver development programs. The village administration also holding training and counseling farming flowers and cattle rabbits for the village in order to increase human resources high quality and creative, through training and counseling the community becomes more interested and participate directly succeed rural development program. The village government Bulukerto also have a program surgical home for the poor community. Development programs planned and executed by the government of the village have managed to draw the attention of the community and make the community participate directly in ensuring the success of development in the village of Bulukerto. Awareness of the importance of development for public welfare make the village community Bulukerto become important players in the village development, the community not only participate but also the public also a superintendent in the implementation of development.*

***Keywords :** Effectiveness, Development Planning, Public Participation*

**Abstrak:** Efektivitas Pemerintah Desa Bulukerto sangat berpengaruh dalam proses pembangunan di desa, karena melalui pemerintah desa sebuah pembangunan fisik maupun non fisik akan terlaksana apabila Pemerintah Desa benar-benar melakukan tugasnya dengan benar. Program Pemerintah Desa Bulukerto dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan musyawarah bersama perangkat Desa Bulukerto guna menyampaikan program-program pembangunan. Pemerintah Desa juga mengadakan pelatihan dan penyuluhan bertani bunga dan ternak kelinci untuk masyarakat Desa guna meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu dan kreatif, melalui pelatihan dan penyuluhan masyarakat menjadi lebih tertarik dan berpartisipasi langsung menyukseskan program pembangunan Desa. Pemerintah Desa Bulukerto juga mempunyai program bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa telah berhasil menarik perhatian masyarakat dan membuat masyarakat ikut berpartisipasi langsung dalam menyukseskan pembangunan di Desa Bulukerto. Kesadaran akan pentingnya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat membuat masyarakat Desa Bulukerto menjadi pelaku penting dalam pembangunan desa, masyarakat tidak hanya berpartisipasi tetapi juga masyarakat turut menjadi pengawas dalam pelaksanaan pembangunan.

***Kata Kunci :** Efektivitas, Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat*

### **PENDAHULUAN**

Konsep perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sebelum Repelita IV (1983/1984) menerapkan *top-down planning* atau perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kebawah. Filosofi pembangunan dalam beberapa dasawarsa waktu itu adalah bertumpuh pada paradigma klasik (*trickling down effect* atau dampak tetesan ke bawah). Dampak tetesan ke bawah merupakan mekanisme pembangunan yang instruktif dan bersifat *top-down*. Konsep pembangunan ini

dimotivasi oleh semangat pembangunan yang menganggap pertumbuhan maksimal melalui produktivitas yang tinggi dan kompleksitas produksi. Aplikasi konsep ini telah menimbulkan berbagai masalah yang cukup serius, misalnya ketimpangan, kemiskinan, keterbelakangan dan kemalasan. Dampak-dampak negatif tersebut secara tidak langsung mengakibatkan kemelaratan untuk masyarakat bawah. Masyarakat bawah menjadi sekedar sebagai objek, sebagai penonton dan sebagai suplemen pembangunan yang tidak bijaksana yang tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan masyarakat di daerahnya (Adisasmita 2013 : 59).

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran suatu organisasi yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Efektivitas juga merupakan seberapa baik pekerjaan yang sudah dilakukan dan sampai sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Dalam menentukan efektivitas dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

Ketepatan sasaran, Perubahan nyata, Tercapainya target, Ketepatan waktu, Tercapainya tujuan, Pemahaman program. Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Adisasmita (2006 : 38), partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Achmadi dan Cholid Metode penelitian memiliki dua suku kata yakni “metode” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dan “penelitian” yang berarti kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrument kunci dan teknik. Penelitian ini dilakukan di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu dengan cara menentukan sampel diantara beberapa sampel yang ada. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu data diambil dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan 3 teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

- Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan, dimana reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.
- Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
- Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana kesimpulan-kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Pembangunan Fisik Desa**

Pembangunan fisik merupakan wujud nyata dari pembangunan non fisik yang meliputi sosial ekonomi, budaya dan sebagainya. Pembangunan fisik adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh agen pembangunan dengan maksud membuat suatu perubahan yang lebih baik dan bisa dilihat secara nyata dari bentuk perubahannya. Pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Bulukerto saat ini mencapai 80% dibandingkan dengan pembangunan non fisik yang hanya 20%. Berbagai macam pembangunan fisik yang sudah di laksanakan oleh Pemerintah Desa, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan jembatan, pembangunan tempat ibadah dan bedah rumah masyarakat.

Pembangunan fisik Desa Bulukerto, telah mencapai waktu dan target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Bulukerto. Dalam melaksanakan pembangunan fisik Desa Bulukerto, telah terjadi perubahan nyata pada Desa dan juga masyarakat Desa Bulukerto yang beranggapan bahwa kualitas Pemerintah Desa dalam pembangunan sangat berguna dan memberikan pengaruh positif terhadap perubahan masyarakat dan juga perubahan Desa pada umumnya. Seperti yang dijelaskan oleh Saxena (dalam Indrawijaya 2010 : 176), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu telah dicapai. Makin besar target yang tercapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Efektivitas menjadi tolak ukur dari suatu pekerjaan yang dilakukan, efektivitas dilihat bukan hanya dari tingkat keberhasilan bentuk suatu pekerjaan, tetapi juga melihat konsistensi waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam pekerjaan.

Pembangunan di desa sudah menjadi tanggung jawab Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP No 72 Tahun 2005 bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum. Efektivitas menjadi tolak ukur dari suatu pekerjaan yang dilakukan, efektivitas dilihat bukan hanya dari tingkat keberhasilan bentuk suatu pekerjaan, tetapi juga melihat konsistensi waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam pekerjaan. efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu telah dicapai. Makin besar target yang tercapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Efektivitas menjadi tolak ukur dari suatu pekerjaan yang dilakukan, efektivitas dilihat bukan hanya dari tingkat keberhasilan bentuk suatu pekerjaan, tetapi juga melihat konsistensi waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam pekerjaan. Efektivitas Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan fisik telah sesuai dengan arti dari pembangunan fisik itu sendiri yaitu, pembangunan fisik merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh agen pembangunan dengan maksud membuat suatu perubahan yang lebih baik dan bisa dilihat secara nyata dari bentuk perubahannya. Pembangunan fisik desa telah mencapai sasaran, target dan perubahan nyata pada pembangunan dan masyarakatnya yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Efektivitas juga dinilai dari sudut pandang pencapaian tujuan, dimana suatu keberhasilan harus dipertimbangkan, bukan hanya sasaran tetapi juga mekanisme dan manajemen dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Efektivitas Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan Desa yaitu terlaksananya program pembangunan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Desa dengan tepat waktu dan sasaran. Pembangunan fisik yang diprogram oleh Pemerintah Desa yaitu program Bedah Rumah bagi warga Desa yang kurang mampu. Dengan melakukan sosialisasi dan musyawarah bersama RT yang mewakili warganya, Pemerintah Desa menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan untuk warga Desa yang kemudian hal ini disampaikan oleh RT melalui pertemuan bersama warga, dan menarik warga untuk ikut berpartisipasi langsung dalam proses pelaksanaannya hingga selesai.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan Desa telah dapat diukur melalui beberapa indikator efektivitas, yaitu :

1. Ketepatan sasaran
2. Pemahaman program
3. Ketepatan waktu
4. Tercapainya target
5. Tercapainya tujuan
6. Perubahan nyata

### **Efektivitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Pembangunan Non Fisik Desa**

Pembangunan non fisik Desa Bulukerto yang dilaksanakan Pemerintah Desa membawa pengaruh positif terhadap masyarakat Desa, perubahan masyarakat Desa telah terlihat dari hasil pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan menjadikan masyarakat Desa Bulukerto menjadi SDM yang berkeaktifitas dan menghasilkan keuntungan dari kreativitas masyarakat Desa Bulukerto. Perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Bulukerto merupakan keefektifitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan program pembangunan, mulai dari proses sampai pelaksanaan pembangunannya.

Pembangunan non fisik yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melalui pelatihan dan penyuluhan dalam bertani, ternak dan pelatihan terhadap Ibu-Ibu PKK. Dari pelatihan dan penyuluhan inilah yang menciptakan SDM Desa Bulukerto menjadi lebih baik.

Hasil dari pelatihan dan penyuluhan warga Desa terlahirlah berbagai macam kreativitas warga Desa, dari kreativitas warga bisa merubah taraf hidup dan pola hidup masyarakat yang cerdas. Dan hasil dari kreativitas warga ini berubah menjadi penghasilan yang membantu warga Desa dalam mempertahankan hidup ditengah ekonomi yang cukup tinggi pada saat ini.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Bulukerto, maka Pemerintah Desa membuat program pembangunan non fisik yaitu, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melalui pelatihan dan penyuluhan dalam bertani, ternak dan pelatihan terhadap Ibu-Ibu PKK. Dari pelatihan dan penyuluhan inilah yang menciptakan SDM Desa Bulukerto menjadi lebih baik. Sesuai dengan definisi dari pembangunan non fisik yaitu pembangunan yang lebih mengarah kepada pembangunan yang bersifat tidak dapat dilihat berdasarkan wujud pembangunannya, tetapi lebih berfokus pada pembangunan sumber daya. Contohnya, pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan non fisik Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bulukerto hanya mencapai 20% lebih sedikit dibandingkan dengan pembangunan fisik desa, tetapi dengan hanya 20% pembangunan non fisik sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, mulai dari pelatihan dan penyuluhan pertanian apel, pelatihan ibu PKK, penyuluhan ternak kelinci dan pendalaman ilmu agama.

Hasil dari pelatihan dan penyuluhan warga Desa telah terlihat perubahan yang nyata pada masyarakat yang melahirkan berbagai macam kreativitas warga Desa, dari kreativitas warga bisa merubah taraf hidup dan pola hidup masyarakat yang cerdas. Dan hasil dari kreativitas warga ini berubah menjadi penghasilan yang membantu warga Desa dalam mempertahankan hidup ditengah ekonomi yang cukup tinggi pada saat ini.

Pada konsep pembangunan, proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak berlangsung secara spontan, melainkan diusahakan atau direncanakan lebih rinci lagi. Sehingga aktualisasi tersebut direalisasikan dalam bentuk pembangunan. Oleh karena itu, dalam memperbaiki

taraf hidup melalui pembangunan, tidak hanya pada salah satu aspek saja, seperti aspek materi saja, melainkan meliputi aspek non materi bahkan non fisik. Konsep pembangunan, khususnya pembangunan nasional di Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 2004 yang mengatur sistem perencanaan pembangunan mengatakan bahwa hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Efektivitas Pemerintah Desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik telah berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Hal ini tidak lepas dari proses perencanaannya yang cukup baik dan maksimal. Dengan melibatkan hampir seluruh masyarakat Desa yang menghasilkan pekerjaan yang sudah direncanakan berjalan sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Efektivitas Pemerintah Desa diukur dari tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan pembangunan berjalan dengan lancar berkat partisipasi dari masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya.

### **Sosialisasi dan Musyawarah Program Bedah Rumah terhadap Masyarakat Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**

Salah Satu Program Pemerintah Desa yang disosialisasikan dan dimusyawarahkan bersama masyarakat Desa yaitu program Bedah Rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini dijalankan dengan mendata penduduk desa yang ekonominya tidak baik dan kondisi rumah yang sudah tidak layak huni. Program Bedah Rumah ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat Desa Bulukerto pada umumnya dan masyarakat pun mendukung dan ikut berpartisipasi dalam program Bedah Rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulukerto.

Program Bedah Rumah merupakan upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan. Melalui program Bedah Rumah, Pemerintah Desa telah mencapai target dan tujuan untuk menarik masyarakat Desa untuk berpartisipasi langsung dalam program-program pembangunan Desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya berupa bantuan fisik, tetapi juga dukungan dan dorongan dari masyarakat untuk menyukseskan program Bedah Rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bulukerto.

Sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Maka dari itu, dalam proses perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menuju keberhasilan suatu pembangunan. Partisipasi dari segenap pribadi-pribadi masyarakat merupakan syarat mutlak terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat juga menyebabkan terjalinnya kerjasama dalam masyarakat dan kerjasama ini perlu pengkoordinasian yang baik dari Pemerintah, dalam hal ini dimaksudkan agar partisipasi tersebut berdaya guna secara efektif.

Program Bedah Rumah merupakan salah satu program Pemerintah Desa Bulukerto dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan mengadakan sosialisasi dan musyawarah bersama BPD, RT dan Perangkat Desa, program ini dilaksanakan guna mengurangi beban dari masyarakat Desa Bulukerto yang dikategorikan warga Desa yang kurang mampu, dari program bedah rumah ini, warga Desa Bulukerto melakukan kerjasama dalam bentuk partisipasi fisik untuk membantu warga Desa yang kurang mampu. Dari program ini masyarakat Desa Bulukerto merasa memiliki dan mempunyai hak untuk melaksanakan tugasnya sebagai objek dari pembangunan dan juga masyarakat menyadari betapa penting dan bergunanya pembangunan Desa bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Dari program bedah rumah yang direncanakan oleh Pemerintah Desa, maka upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa terlaksana sesuai dengan target yang sudah ditentukan, bahwa masyarakat Desa Bulukerto menjadi lebih paham akan arti dari sebuah pembangunan dan seberapa bergunanya pembangunan demi menuju kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa**

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007 : 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Kunci sukses dari sebuah pembangunan tidak terlepas dari aktor utama pembangunan, dan aktor utama pembangunan itu sendiri adalah masyarakat. Pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator dan pemberi dana. Artinya masyarakat tidak boleh dijadikan sebagai objek dari pembangunan akan tetapi masyarakat seharusnya menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat merupakan tokoh penting dari pembangunan, dari pembangunan nasional sampai pembangunan wilayah.

Melalui program-program pembangunan Pemerintah Desa melahirkan kerjasama dengan masyarakat Desa, masyarakat bekerjasama dengan berpartisipasi langsung dalam program pembangunan Pemerintah Desa. Masyarakat Desa lebih memilih untuk turut berpartisipasi langsung daripada hanya duduk diam dan menikmati hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa. Pemahaman akan program pembangunan membuat masyarakat Desa Bulukerto tidak hanya berpartisipasi secara fisik, tetapi juga masyarakat desa turut mengawasi atau mengontrol dalam pelaksanaan program-program pembangunan Pemerintah Desa. Timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan untuk desa tidak terlepas dari upaya Pemerintah Desa dengan mengadakan pertemuan Pemerintah Desa bersama BPD, RT dan juga Perangkat Desa guna membahas program pembangunan yang akan dilaksanakan, Pemerintah Desa Menjelaskan akan pentingnya pembangunan bagi desa dan masyarakat desa kepada RT Desa Bulukerto yang kemudian RT akan melanjutkan dan menjelaskan hasil pembahasan bersama Pemerintah Desa kepada warga melalui pertemuan bersama warga guna membahas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bulukerto.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal Undang-Undang ini yaitu Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas) yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Dengan adanya program partisipatif dapat memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena bentuk partisipasi masyarakat bisa membawa pembangunan di suatu wilayah dapat mencapai kesejahteraan bagi wilayah tersebut dan juga untuk masyarakatnya sendiri. Menurut Alfitri (2011 : 36), pentingnya partisipasi adalah sebagai berikut :

- Partisipasi masyarakat dapat dilibatkan dalam identifikasi masalah, masyarakat bersama perencana mengidentifikasi persoalan, baik peluang, potensi serta hambatan.
- Bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, yang masyarakat libatkan dalam penyusunan perencanaan dan strategi melalui identifikasi masalah sebelumnya.

- Pelaksanaan proyek pembangunan.
- Evaluasi masyarakat dilibatkan dalam menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan.
- Mitigasi yaitu masyarakat terlibat dalam mengukur serta mengurangi dampak negatif pembangunan.
- Monitoring adalah proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak lepas dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai individu maupun kesatuan sistem yang merupakan hal yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, tanggung jawab berhasil dan tidaknya suatu pembangunan tidak hanya berada di tangan Pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat.

Melalui sosialisasi, musyawarah, pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikiran masyarakat disalurkan kepada Pemerintah Desa, masyarakat Desa Bulukerto sebagai objek pembangunan sekaligus pengawas dalam proses pembangunan merupakan bentuk partisipasi yang adil dan merata, dengan adanya keterlibatan masyarakat Desa dalam pembangunan, maka arti dari sebuah pembangunan itu sendiri telah diartikan melalui partisipasi masyarakat demi tercapainya keberhasilan dalam pembangunan di Desa Bulukerto.

Partisipasi masyarakat di Desa Bulukerto cukup baik, sebagian besar masyarakat Desa Bulukerto cukup berperan aktif dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Masyarakat Desa Bulukerto ikut berpartisipasi dalam berbagai bentuk, dari mulai partisipasi dukungan moril sampai partisipasi dalam hal fisik. Partisipasi masyarakat Desa Bulukerto tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa yang telah memberdayakan masyarakat Desa dengan melakukan berbagai pelatihan dan penyuluhan, sikap transparansi Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan telah membuat masyarakat Desa menjadi lebih memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa poin penting yang akan dijadikan kesimpulan dibawah ini, yaitu :

1. Efektivitas Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan telah memenuhi target dan sasaran dari program pembangunan.
2. Melalui sosialisasi, musyawarah, pelatihan dan penyuluhan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berjalan baik dan berdampak positif untuk desa dan masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bulukerto cukup baik, karena dengan adanya sosialisasi dan musyawarah bersama masyarakat desa jadi lebih memahami akan pentingnya pembangunan bagi kelangsungan hidup masyarakat yang sejahtera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi Abu & Cholid Narbuko, 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Adam Ibrahim, Indrawijaya. 2010. *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Refika Aditama. Bandung.

Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press. Depok.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Adisasmita, Raharjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

(Permendagri) No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.